

ROADMAP PENELITIAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021-2025**



**PETA JALAN PENELITIAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



UIN SUNAN KALIJAGA

2021

LEMBAR PENGESAHAN
PETA JALAN PENELITIAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kode Dokumen :
Revisi :
Tanggal Berlaku :
Disahkan Oleh Diperiksa Oleh Disusun Oleh

Prof. Dr. Makhrus,
M.Hum

NIP. 19680202 199303 1
003

Ach Tahir, S.H.I., S.H., LL.M.,
M.A.

NIP. 19800626 200912 1 002

Faiq Tobroni, MH

NIP. 19880402 201801 1
001

TIM PENYUSUN

FAIQ TOBRONI, M.H.

SYAIFULLAHIL MASLUL, M.H.

ANNISA DIAN ARINI, M.H.

WARDATUL FITRI, M.H.

GILANG KRESNANDA ANNAS, M.H.

EDITOR

FAIQ TOBRONI, M.H.

DAFTAR ISI

Contents	
DAFTAR ISI	5
DAFTAR GAMBAR	7
KEPUTUSAN DEKAN	8
KATA PENGANTAR.....	9
PENGANTAR	10
BAB I: PENDAHULUAN	12
Latar Belakang	12
Tujuan	13
Landasan Hukum	13
BAB II: PROFIL PROGRAM STUDI	16
Sejarah dan Perkembangan Program Studi	16
Jenjang KKNI	17
Profil Lulusan	18
Capaian Pembelajaran Program Studi	18
Perkembangan Jumlah Mahasiswa dan Dosen Program Studi	21
Nilai Akreditasi	22
Jumlah SKS	23
Jumlah Mata Kuliah	24
Lembaga Mitra	29
BAB III	30
PETA JALAN PENELITIAN	30
Potensi Sumber Daya	30
Potensi Program Studi	30
Potensi Dosen	31
Potensi Mahasiswa	33
Hasil Penelitian	34
BAB IV PAYUNG PENELITIAN	42
Nama Payung Penelitian	42
BAB V.....	43
PENUTUP	43
BAB V PENUTUP.....	49

REFERENSI..... 50

DAFTAR GAMBAR

KEPUTUSAN DEKAN

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Peta Jalan Penelitian bagi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dapat diselesaikan dengan baik. Pedoman peta jalan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan penelitian dalam rangka mencapai standar nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian terus menerus dilakukan Prodi Ilmu Hukum untuk mencapai hasil penelitian yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan bangsa. Diharapkan hasil penelitian yang bermutu tinggi dapat berkontribusi secara nyata kepada peningkatan daya saing bangsa.

Buku pedoman ini diharapkan dapat memandu civitas akademika Program Studi Ilmu Hukum dalam menyusun peta jalan penelitian sesuai dengan kekhasan keilmuan masing-masing program studi. Terimakasih kepada tim penyusun Program Studi Ilmu Hukum dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan pedoman ini dapat diselesaikan. Semoga waktu dan energi yang telah dicurahkan dapat bernilai amal ibadah dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, amin amin YRA. *Wassalamualaikum wr wb*

Tim Penyusun

PENGANTAR
PETA JALAN PENELITIAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA

Pedoman peta jalan Penelitian Program Studi Ilmu Hukum memberikan panduan secara teknis mengenai penyusunan peta jalan penelitian pada setiap Program Studi Ilmu Hukum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diharapkan peta jalan penelitian yang disusun Program Studi Ilmu Hukum dapat memenuhi berbagai kebutuhan baik sebagai pedoman serta arah penelitian bagi pelaksana, maupun memandu kemanfaatan hasil penelitian kepada bangsa.

Perguruan tinggi memiliki kewajiban menyelenggarakan penelitian kepada masyarakat sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan daya saing bangsa. Penelitian merupakan pilar kegiatan pendidikan di perguruan tinggi, selain dari kegiatan pengajaran, penelitian, dan kegiatan penunjang lainnya yang tercantum di dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dalam rangka mewujudkan penelitian sesuai dengan amanah Undang-undang, diperlukan peta jalan yang berfungsi untuk memandu program studi dalam pelaksanaan dan pengembangan penelitian yang bersifat integratif dan mengoptimalkan potensi sumber daya dosen. Peta jalan penelitian merupakan implementasi dari peta jalan tingkat universitas, yang berisi payung-payung penelitian yang menjadi unggulan. Payung penelitian ini akan melibatkan seluruh program studi. Oleh karena beragamnya kegiatan Penelitian di tingkat program studi, maka peta jalan Penelitian mempertimbangkan keberagaman dan sinergi antar disiplin ilmu.

Peta jalan Penelitian merupakan milestones kegiatan Penelitian dalam ruang waktu tertentu (5-20 tahun) yang dilakukan secara individu (monodisiplin) dan atau kelompok baik secara multidisipliner atau intra/inter disiplin. Secara garis besar, peta jalan penelitian terdiri atas capaian penelitian, strategi Penelitian, pelaksanaan Penelitian, dan kerjasama Penelitian. Penyusunan peta jalan Penelitian selengkapny mengacu pada delapan (8) Standar Nasional Penelitian dan delapan (8) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Penyusunan peta jalan Penelitian Program Studi sekaligus tetap mempertimbangkan delapan (8) Standar Nasional Pendidikan.

Dokumen peta jalan Penelitian Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga memuat hal-hal berikut:

1. Bab 1: Pendahuluan
2. Bab 2: Profil Program Studi Ilmu Hukum
3. Bab 3: Peta Jalan Penelitian Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum

4. Bab 4: Payung Penelitian Fakultas Syariah Dan Hukum
5. Bab 5: Penutup

BAB I: PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengembangan kebijakan Penelitian pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tidak bisa dilepaskan dari kondisi eksternal. Beberapa hal kondisi eksternal yang mempengaruhi kebijakan Penelitian adalah Kondisi Eksternal Lingkungan Makro (Aspek Politik, Ekonomi, Kebijakan), Kondisi Eksternal Lingkungan Makro (Aspek Sosial, Budaya dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), Kondisi Eksternal Lingkungan Mikro (Aspek Pesaing, User/Pengguna Lulusan, Kebutuhan Masyarakat dan Mitra), Kondisi Eksternal Lingkungan Mikro (Aspek Sumber Calon Mahasiswa, Sumber Calon Dosen, dan Sumber Calon Tenaga Kependidikan), dan Kondisi Lingkungan Mikro (Aspek E-Learning, Pendidikan Jarak Jauh, Open Course Ware).

Dalam menyongsong tantangan kondisi eksternal tersebut, Fakultas Syariah dan Hukum telah menyusun rencana strategis. Rencana Strategis FSH telah disahkan pada September 2019. Rencana Strategis tersebut telah disusun berdasarkan sembilan (9) kriteria. Beberapa point penting ranstra sesuai dengan akreditasi sembilan (9) kriteria adalah Kondisi Eksternal dan Profil Fakultas; Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi; Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama; Mahasiswa; Sumber Daya Manusia; Keuangan, Sarana, dan Prasarana; Pendidikan; Penelitian; Pengabdian kepada Masyarakat; Luaran dan Capaian Tridharma; dan Analisis dan Penetapan Program Pengembangan.

Peta jalan Penelitian Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum ini merupakan deskripsi terhadap Penelitian yang sudah dilakukan oleh dosen-dosen Prodi Ilmu Hukum dan rencana pengembangan Penelitian yang akan dilakukan yang disertai dengan luaran yang diharapkan muncul dari Penelitian yang dilakukan. Peta jalan Penelitian ini disusun dengan menggunakan Penelitian dasar, Penelitian terapan dan pengembangan pengembangan Prodi Ilmu Hukum, serta disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan rumpun rumpun yang ada dalam Prodi Ilmu Hukum.

Pentingnya penyusunan peta jalan Penelitian Prodi Ilmu Hukum ini terkait dengan

:

1. Perubahan eksternal UIN Sunan Kalijaga. Salah satunya adalah perubahan status IAIN menjadi UIN Sunan Kalijaga berdasarkan Keputusan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2004 yang isinya perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga. Dengan adanya perubahan tersebut Prodi Ilmu Hukum dituntut bisa memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan serta proses integrasi antara bidang ilmu

- agama Islam dengan bidang ilmu umum
2. Rencana strategis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
 3. Perubahan regulasi standar nasional Pendidikan tinggi
 4. Perubahan akreditasi 7 standar menuju 9 kriteria
 5. Perkembangan Penelitian dosen Prodi Ilmu Hukum
 6. Pertanyaan Penelitian meliputi: *development* atau pengembangan pengabdian kepada masyarakat; diseminasi pengabdian kepada masyarakat; prioritas pengabdian kepada masyarakat; strategi memperluas jaringan secara global dan terkait hak kekayaan intelektual; sumber daya yaitu bagaimana meningkatkan kualitas sumberdaya dalam pengabdian kepada masyarakat.
 7. Visi, misi, Renstra Universitas Bidang Kualitas Penelitian dan Rencana Induk Pengembangan LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 8. Visi-Misi-Renstra dan Rencana Induk Pengembangan, serta Rencana Operasional Fakultas Bidang Kualitas Penelitian, Visi-Misi dan Kekhasan Program Studi dan Fakultas UIN Sunan Kalijaga

Tujuan

Tujuan pembuatan peta jalan Penelitian program studi Ilmu Hukum ini sebagai pedoman dan arah kegiatan Penelitian yang didanai oleh universitas, di samping kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh perorangan dan kelompok, pusat studi, serta laboratorium Ilmu Hukum.

Landasan Hukum

Butir-butir kebijakan dalam penjaminan mutu Penelitian. Landasan yuridis yang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan tahapan penyusunan peta jalan Penelitian.

Penyusunan peta jalan Penelitian kepada masyarakat Prodi Ilmu Hukum disusun dengan landasan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
11. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
12. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
13. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
14. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Peneliti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
15. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
16. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
17. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
18. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
19. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
20. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
21. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
22. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

UIN Sunan Kalijaga Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019

23. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
24. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
25. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
26. Abdullah, M.A. 2006. *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Revisi 1. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

BAB II: PROFIL PROGRAM STUDI

Sejarah dan Perkembangan Program Studi

Program Studi Ilmu Hukum merupakan program studi strata satu (S-1) yang didirikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tahun 2009 sebagai amanat *wider-mandate* semenjak perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salah satu yang mendasari berdirinya Program Studi Ilmu Hukum adalah *girah* Fakultas Syari'ah dan Hukum untuk berperan serta memberikan kontribusi hukum di Indonesia. Dengan slogan integrasi-interkoneksi keilmuan, diharapkan muncul generasi hukum yang bermartabat hasil didikan perguruan tinggi keislaman.

Pendirian Program Studi Ilmu Hukum pertama kali diinisiasi oleh Drs. Barmawi Mukri, M.Ag. S.H., dosen Hukum di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga tahun 2004 dengan mengundang dosen-dosen yang bergelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga. Hasil dari pertemuan ini dibentuklah Tim Pendirian Program Studi Ilmu Hukum, dengan Drs. Barmawi Mukri, M.Ag. S.H. (Ketua), Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum. (Sekretaris), Siti Fatimah, S.H. M.Hum. (Anggota), Udiyo Basuki, S.H. M.Hum. (Anggota), Iswantoro, S.H. M.H. (Anggota), Budi Ruhiatudin, S.H. M.Hum. (Anggota), Muyassarotussolichah, S.H. M.Hum. (Anggota), dan Nanang Moh. Hidayatullah, S.H. M.Si. (Anggota).

Proposal Pendirian Program Studi Ilmu Hukum diajukan pertama kali ke Fakultas Syariah pada tanggal 2 Januari 2006 (surat 25 Desember 2005). Dekan Fakultas Syari'ah pada saat itu (Dr. K.H. Malik Madani, M.A.) kemudian mengajukan proposal tersebut ke Senat Fakultas pada bulan Maret 2006 dan disidangkan di Senat Fakultas pada hari Rabu, 19 April 2006. Setelah terhambat selama satu tahun, pada hari Rabu, 4 April 2007 proposal pendirian Program Studi di Ilmu Hukum disidangkan ke Senat Universitas. Komisi Akademik Senat Universitas baru menyidangkan kembali pada hari Senin, 3 Maret 2008.

Setelah mendapatkan Rekomendasi dari Senat Universitas, proposal pendirian Program Studi Ilmu Hukum diajukan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dan tidak lama kemudian mendapatkan rekomendasi pendirian dengan surat Nomor 3487/D2.2/2008 tanggal 30 Desember 2008. Setelah mendapatkan rekomendasi ini, proposal kemudian diajukan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama, dan akhirnya mendapatkan izin operasional dengan surat Nomor DJ.I/32/09 tanggal 20 Januari 2009. Dengan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor DS-12.a Tahun 2009 tanggal 18 Februari 2009,

Dekan Fakultas Syari'ah saat itu (Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D.) secara resmi membuka Program Studi Ilmu Hukum. Lulusan Program Studi Ilmu Hukum bergelar Sarjana Hukum (S.H.).

Jenjang KKNI

Disahkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mendorong Program Studi Ilmu Hukum FSH UIN Sunan Kalijaga untuk melakukan penyesuaian dengan segala aturan yang termuat di dalamnya. KKNI merupakan pernyataan kualitas mahasiswa yang kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*).

Program Studi Ilmu Hukum sebagai pelaksana program studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang bertugas menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual yang kompeten di bidangnya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi seorang profesional di bidangnya. Oleh karena itu, Program Studi Ilmu Hukum perlu merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI. Agar rumusan capaian pembelajaran Program Studi Ilmu Hukum selaras dengan deskripsi capaian pembelajaran KKNI, maka rumusannya harus mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

SNPT merupakan satuan standar yang mencakup standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan Program Studi harus mengacu ketiga standar tersebut, karena menjamin pencapaian mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat program studi. Oleh karena itu, Program Studi Ilmu Hukum mengacu SNPT dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum, serta melaksanakan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selain itu, pengembangan kurikulum Program Studi Ilmu Hukum juga memperhatikan konsep keilmuan yang dikembangkan oleh UIN Sunan Kalijaga, yaitu integrasi-interkoneksi keilmuan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program pendidikan perlu mengintegrasikan dan menginterkoneksi keilmuan keislaman, keindonesiaan, dan ilmu hukum dalam berbagai ranah, yaitu ranah filosofis, ranah materi, ranah metodologis, dan ranah strategis. Untuk itu, kajian ilmu hukum harus memilih beberapa model yang direkomendasikan, yaitu informatif, konfirmatif/klarifikatif, korektif; atau beberapa model

yang lebih rinci, seperti komparasi, induktifikasi, dan verifikasi. Sehingga, diharapkan pengembangan keilmuan dapat dilakukan secara utuh, mendalam, dan peduli terhadap wilayah ‘amali, praktis nyata dalam realitas dan etika. Dengan demikian, diharapkan lulusan Program Studi Ilmu Hukum merupakan sosok lulusan yang memiliki keterpaduan iman, ilmu, dan amal.

Profil Lulusan

Lulusan program studi ilmu hukum diharapkan mampu menjadi praktisi hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, panitera, mediator, Legal Officer perusahaan/perbankan, Dosen, Peneliti Hukum, dan Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian proses pembelajaran yang dijalankan Program Studi Ilmu Hukum bertujuan untuk mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu hukum. Adanya kesesuaian antara kurikulum dan strategi pembelajaran yang dilakukan prodi ilmu hukum nampak pada jumlah lulusan yang bekerja di sesuai dengan keilmuannya.

Capaian Pembelajaran Program Studi

Capaian pembelajaran diukur berdasarkan pemenuhan aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang disusun secara sistemik dan terstruktur dalam rencana pembelajaran semester (Rencana Pembelajaran Semester (RPS) melalui pengujian dan penilaian dalam bentuk terstruktur dan bervariasi. Capaian pembelajaran yang diharapkan Prodi Ilmu Hukum meliputi:

a. Sikap

- Berkomitmen dan taat hanya kepada satu Tuhan dan memiliki kemauan yang kuat untuk mengekspresikan religiusitasnya.
- Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan norma agama, moral dan etika
- Memberikan kontribusi yang baik bagi kemajuan kehidupan sosial, bangsa, dan pemerintahan serta bagi pembangunan peradaban Berlandaskan Pancasila.
- Menjadi warga negara yang baik yang menunjukkan kebanggaan dan kecintaan yang tinggi pada bangsanya serta memiliki rasa nasionalis dan tanggung jawab yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya.
- Mewujudkan dan menghormati keragaman budaya, agama, dan kepercayaan serta pemikiran dan inovasi kreasi orang lain.
- Bersikap kooperatif dan memiliki kepekaan yang baik terhadap masalah sosial dan lingkungan.

- Mematuhi hukum dan berkomitmen untuk itu dalam kehidupan sosial dan nasionalnya.
- Menjaga nilai-nilai akademik, norma dan etika tetap terinternalisasi dalam sikapnya.
- Mampu bertanggung jawab secara independen tentang keahlian akademisnya.
- Menjaga semangat kemandirian, perjuangan dan kewirausahaan.

b. Pengetahuan

- Terbukti diakui di bidang hukum dan mampu menunjukkan keilmuannya dalam berdiskusi tentang ilmu hukum dan sistem hukum nasional secara komprehensif, terintegrasi dan sistematis.
- Memahami teknik dasar kemahiran hukum dan mendemonstrasikannya melalui kemampuannya dalam negosiasi, komunikasi, proses peradilan, advokasi hukum dan penyusunan hukum sesuai dengan nilai dan prinsip etika profesi hukum.
- Menerapkan keahlian dan kemahiran peradilan dalam menganalisis dan membangun argumen hukum dan dasar pemikiran untuk membuat dan melaksanakan aturan hukum dalam penyelesaian masalah hukum.
- Mampu menganalisis persoalan hukum berdasarkan metodologi penelitian dan menghasilkan literatur hukum yang sesuai dengan etika kaidah akademik atau mengembangkan hukum dan keadilan, atau menemukan kearifan hukum lokal yang layak diangkat berskala nasional maupun internasional
- Mengidentifikasi dan membahas hukum Islam yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem hukum nasional serta aspek dan elemen lain yang relevan dengan kajian dan pengembangan hukum.
- Ahli dalam mengevaluasi sistem hukum nasional Indonesia dan aspek lain yang relevan agar kajian dan perkembangan hukum berjalan sesuai dengan perubahan sosial

c. Keterampilan Umum

- Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif untuk mengembangkan atau menerapkan ilmu dan teknologi sesuai dengan nilai kemanusiaannya.
- Memiliki jiwa yang baik untuk tampil mandiri, sistematis dan tidak ternilai.
- Memiliki ketrampilan menilai dampak pembangunan dan menerapkan ilmu dan teknologi sesuai dengan keahliannya berdasarkan nilai kemanusiaan, norma dan

etika karya ilmiah untuk pembinaan gagasan kontributif, serta kritik untuk menghasilkan karya ilmiah.

- Memiliki keahlian dan pengetahuan yang baik dalam menghasilkan karya akademik berdasarkan penelitian ilmiah baik berupa skripsi maupun skripsi yang layak dipublikasikan di website universitas
- Bijak dalam mengambil keputusan yang tepat untuk memecahkan masalah keahliannya berdasarkan analisis data.
- Memiliki keterampilan yang baik dalam memelihara dan mengembangkan jaringan dengan supervisor dan rekan kerja baik di dalam maupun di luar lembaga.
- Berhati-hati dalam pencapaian kerja tim serta melakukan supervisi dan evaluasi penyelesaian pekerjaan.
- Memiliki kemampuan dalam melakukan evaluasi terhadap penyelesaian tugas yang diambil oleh kelompok dibawah pengawasan dan dalam mengelola proses pembelajaran secara mandiri.
- Keterampilan mendokumentasikan, menyimpan, dan mengamankan data untuk memastikan keaslian dan menghindari plagiarism.

d. Keterampilan Khusus

- Mampu menjelaskan dan membahas ilmu hukum dan sistem Hukum Nasional Indonesia secara menyeluruh dan sistematis.
- Memiliki keahlian yang baik dalam bernegosiasi, berkomunikasi, dan mengadili di pengadilan, mengadvokasi dan menyusun dokumen hukum berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam kode etik profesi.
- Memiliki kemampuan berfikir yuridis yang memadai sehingga dapat digunakan untuk menganalisis dan membangun argumen dan dasar pemikiran hukum untuk membuat dan melaksanakan aturan yang relevan dalam penyelesaian perkara hukum.
- Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam melakukan penelitian dan menulis laporannya sesuai dengan kaidah etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum dan aturan hukum terapan atau mengidentifikasi praktek-praktek lokal di bidang hukum yang layak untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional atau internasional.
- Memiliki kapasitas yang baik untuk mengelaborasi dan mendiskusikan hukum Islam yang dapat berkontribusi pada perkembangan sistem hukum nasional

Indonesia dan menelaah beberapa aspek lain yang relevan dengan kajian dan perkembangan hukum

- Memiliki kemampuan yang baik untuk mengevaluasi sistem hukum Indonesia dan beberapa aspek kajian hukum lainnya yang relevan dengan kajian dan perkembangan hukum untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan sosial.

Perkembangan Jumlah Mahasiswa dan Dosen Program Studi

Dari sisi jumlah mahasiswa, Prodi Ilmu Hukum dari tahun ke tahun memiliki animo jumlah mahasiswa yang semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah mahasiswa baru yang semakin bertambah, demikian halnya jumlah mahasiswa aktif seperti pada tabel berikut:

#	Pendaftar	Diterima	Registrasi
2017	1995	176	146
2018	2095	177	146
2019	1907	171	150
2020	1798	233	177

Sumber: <https://admisi.uin-suka.ac.id/rekap/app/dashboards/prodi>

Untuk Mahasiswa Aktif Juga tabel berikut:

Ganjil 2020	724
Genap 2019	654
Ganjil 2019	722
Genap 2018	631
Ganjil 2018	682
Genap 2017	612
Ganjil 2017	591
Genap 2016	615
Ganjil 2016	697

Sumber:

https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_prodi/MTI2RUZCNzYtOEM4OC00NDZFLUI4OTQ0ODVFNjkwMEM4QjMw/20192

Untuk Rasio Dosen adalah Sebagai Berikut:

Rasio Dosen : Mahasiswa 2017/2018	1 : 22.73
Rasio Dosen : Mahasiswa 2018/2019	1 : 23.29

Sumber:

https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_prodi/MTI2RUZCNzYtOEM4OC00NDZFLUI4OTQ0ODVFNjkwMEM4QjMw/20192

Nilai Akreditasi

Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum pertama kali diajukan ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) setelah 2 (dua) tahun berjalan. Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 019/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011, Program Studi Ilmu Hukum mendapatkan peringkat akreditasi C. Namun pada tahun 2014, Program Studi Ilmu Hukum mengajukan re-

akreditasi dan berdasar Keputusan BAN-PT No. 506/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015 Program Studi Ilmu Hukum mendapatkan akreditasi A.

Jumlah SKS

Untuk lulus dari Program Studi Ilmu Hukum, Mahasiswa harus menempuh Jumlah SKS untuk Prodi Ilmu Hukum sebanyak 152 SKS, yang terdiri dari Mata Kuliah Wajib sebanyak 138 SKS, kemudian Mata Kuliah pilihan sebanyak 14 SKS.

Jumlah Mata Kuliah

Daftar Mata Kuliah

Jenjang S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

No	Nama Matakuliah	Semester	SKS				Jenis MK	Kelompok Matakuliah
			Tatap Muka	Praktikum	Praktek Lapangan	SKS Total		
1	Pancasila	I	14			2	Wajib	Nasional
2	Kewarganegaraan	I	14			2	Wajib	Nasional
3	Bahasa Indonesia	I	14			2	Wajib	Nasional
4	Bahasa Inggris	I	14			2	Wajib	Prodi
5	Islam dan Ilmu Sosial Humaniora	I	14			2	Wajib	Universitas
6	Pengantar Ilmu Hukum	I	14			3	Wajib	Prodi
7	Pengantar Hukum Indonesia	I	14			3	Wajib	Prodi
8	Pengantar Studi Islam	I	28			4	Wajib	Universitas
9	Fikih dan Ushul Fikih	I	14			2	Wajib	Prodi
10	Hukum Tata Negara	II	28			4	Wajib	Prodi
11	Hukum Administrasi Negara	II	14			3	Wajib	Prodi
12	Hukum Pidana	II	28			4	Wajib	Prodi
13	Hukum Perdata	II	28			4	Wajib	Prodi
14	Hukum Adat	II	14			3	Wajib	Prodi
15	Peradaban Islam (semula semester 3)	II	14			2	Wajib	Universitas
16	Ilmu Negara (semula semester 4)	II	14			3	Wajib	Prodi
17	Hukum Agraria	III	14			4	Wajib	Prodi

18	Hukum Internasional	III	14		4	Wajib	Prodi
19	Hukum Pidana Khusus	III	14		2	Wajib	Prodi
20	Hukum Cyber/Telematika/Teknologi	III	14		2	Wajib	Prodi
21	Hukum Dagang	III	14		2	Wajib	Prodi
22	Ulum Al-Hadis (semula semester 2)	III	14		2	Wajib	Universitas
23	Ulum Al-Qur'an (semula semester 2)	III	14		2	Wajib	Universitas
24	Hukum Perdata Internasional (semula smt 4)	III	14		2	Wajib	Prodi
25	Islam dan Sains (semula smt 2)	III	14		2	Wajib	Universitas
26	Bahasa Arab (semula smt 1)	III	14		2	Wajib	Prodi
27	Hukum Pajak (semula smt 3)	IV	14		2	Wajib	Prodi
28	Filsafat Hukum (semula smt 3)	IV	14		3	Wajib	Prodi
29	Hukum Lingkungan (semula smt 3)	IV	14		2	Wajib	Prodi
30	Sejarah Hukum	IV	14		2	Wajib	Prodi
31	Politik Hukum	IV	14		2	Wajib	Prodi
32	Hukum Ketenagakerjaan	IV	14		2	Wajib	Prodi
33	Ilmu dan Teori Perancangan Perundang-undangan	IV	14		2	Wajib	Prodi
34	Hukum dan HAM (semula smt 5)	IV	14		2	Wajib	Prodi
35	Hukum Publik Islam	IV	14		2	Wajib	Universitas
36	Hukum Perdata Islam	IV	14		2	Wajib	Prodi
37	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	V	14		2	Wajib	Prodi
38	Hukum Acara Peradilan Agama	V	14		2	Wajib	Prodi
39	Hukum Acara Peradilan Militer	V	14		2	Wajib	Prodi
40	Hukum Acara PTUN	V	14		2	Wajib	Prodi
41	Hukum Acara Pidana dan Pembuktian	V	14		3	Wajib	Prodi
42	Hukum Acara Perdata	V	14		3	Wajib	Prodi
43	Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum	V	14		3	Wajib	Prodi
44	Metode Penemuan Hukum	V	14		2	Wajib	Prodi

45	Sosio-Antropologi Hukum (semula smt 4)	V	14			3	Wajib	Prodi
46	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	V	14			2	Wajib	Prodi
47	Praktik Peradilan TUN	VI	14			2	Wajib/Magang	Prodi
48	Praktik Perancangan Perundang-undangan	VI	14			2	Wajib/Magang	Prodi
49	Praktik Peradilan	VI	14			2	Wajib/Magang	Prodi
50	Magang	VI	14			2	Wajib/Magang	Prodi
51	Kontrak Bisnis Internasional	VI	14			2	Pilihan Kemahiran	Prodi
52	Teknik Investigasi	VI	14			2	Pilihan Kemahiran	Prodi
53	Advokatur	VI	14			2	Pilihan Kemahiran	Prodi
54	Resolusi Konflik Alternatif	VI	14			2	Pilihan Kemahiran	Prodi
55	Penyelesaian Sengketa	VI	14			2	Pilihan Kemahiran	Prodi
56	Perbandingan Hukum Pidana	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi
57	Politik Hukum Pidana	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi
58	Sistem Peradilan Pidana	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi
59	Kriminologi	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi
60	Hukum Pidana Internasional	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi
61	Hukum Forensik	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi
62	Hukum Pidana Militer	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi
63	Hukum Pidana Lingkungan	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi

64	Hukum Pidana Anak	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi
65	Hukum Pidana Adat	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi
66	Hukum Pemerintah Daerah	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi
67	Hukum Konstitusi	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi
68	Perbandingan Hukum Tata Negara	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi
69	Hukum Keparitaan dan Pemilu	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi
70	Kekuasaan Kehakiman	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi
71	Hukum Kewarganegaraan	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi
72	Hukum Anggaran Negara	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi
73	Hukum Perijinan	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi
74	Hukum Kesehatan	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi
75	Hukum Kebijakan Publik	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi
76	Hukum Perbankan	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi
77	Hukum Pasar Modal dan Investasi	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi

78	Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi
79	Hukum Jaminan	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi
80	Hukum Kepailitan	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi
81	Hukum Asuransi	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi
82	Hukum Surat-surat Berharga	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi
83	Hukum Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi
84	Hukum Lembaga Pembiayaan	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi
85	Hukum Perlindungan Konsumen	VI	14			2	Pilihan Konsentrasi	Prodi
86	KKN	VII				4	Wajib	Prodi
87	Skripsi	VII				6	Wajib	Prodi

Lembaga Mitra

1	Pengadilan Negeri Yogyakarta	Praktik Peradilan dan Magang	MOU/PKS
2	Pengadilan Negeri Sleman	Praktik Peradilan dan Magang	MOU/PKS
3	Pengadilan Militer	Praktik Peradilan dan Magang	MOU/PKS
4	Kemenkumham	Legal Drafting dan Magang	MOU/PKS
5	Kejaksaan	Magang dan pembimbingan Lomba	MOU/PKS

BAB III

PETA JALAN PENELITIAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Potensi Sumber Daya
Potensi Program Studi

Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum yang lahir di tahun 2009 merupakan prodi termuda di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Lahirnya prodi ini, antara lain, dilatarbelakangi oleh kegelisahan sebagian akademisi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia yang cenderung formalistik dan kurangnya pepaduan antara hukum positif dengan hukum Islam. Secara politik, lahirnya prodi ini akan memberi kesempatan bagi alumni Prodi Ilmu Hukum di bawah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk bisa berkiprah mengembangkan kompetensinya baik sebagai akademisi, praktisi maupun peneliti, tidak saja di lingkungan Kementerian Agama atau Peradilan Agama namun juga di semua lembaga pemerintahan dan lembaga peradilan.

Secara ekonomi, kesempatan dan peluang yang luas bagi alumni prodi Ilmu hukum untuk mendapatkan lapangan kerja ini membawa keberuntungan tidak saja bagi alumni namun juga bagi prodi dan fakultas. Sejak awal berdiri, animo masyarakat untuk kuliah di Prodi Ilmu Hukum cukup tinggi sehingga tingkat kompetisinya cukup ketat dan pada gilirannya prodi mendapatkan input mahasiswa baru yang berkualitas. Rasio yang kompetitif antara pendaftar dengan daya tampung ini juga sangat bermanfaat untuk kepentingan akreditasi. Sedangkan bagi universitas dan fakultas, banyaknya pendaftar prodi ilmu hukum telah menyumbang pendapatan bagi Badan Layanan Umum Universitas.

Kondisi di atas telah mendorong pimpinan fakultas dan prodi mengeluarkan kebijakan untuk menambah daya tampung mahasiswa baru dan menambah tenaga pendidik (dosen) yang berkompeten dalam bidang ilmu hukum. Langkah ini dimulai dengan mengusulkan pada universitas dan Kementerian Agama untuk membuka formasi CPNS dosen atau dosen tetap bukan PNS yang kompeten dalam bidang ilmu hukum. Kebijakan ini juga menuntut fakultas dan prodi untuk mempersiapkan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Secara sosial dan budaya, animo besar masyarakat mendaftar di Prodi Ilmu Hukum dan peluang yang luas bagi alumni prodi ilmu hukum berkiprah di semua lembaga, di samping prestasi yang diraih mahasiswa dalam berbagai kompetisi baik lokal, nasional, maupun internasional telah menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri bagi keluarga besar PTKI pada umumnya dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya. Terlebih dalam rentang waktu 5 tahun, Prodi Ilmu Hukum ini telah mendapatkan peringkat nilai akreditasi "A" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Capaian yang diraih Prodi Ilmu Hukum ini telah mendorong prodi-prodi lain untuk berpacu meraih prestasi yang maksimal.

Kemudian dalam rangka mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hukum dan merespon perkembangan yang terjadi di masyarakat, Prodi Ilmu Hukum

melakukan *review* terhadap kurikulum dan kelengkapannya. Selain itu, Prodi Ilmu Hukum mengirim dosen untuk mengikuti berbagai kegiatan ilmiah dalam rangka peningkatan kompetensi keilmuannya. Usaha lain yang dilakukan untuk mensejajarkan Prodi Ilmu Hukum PTKI dengan Prodi Ilmu Hukum di bawah Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek Dikti), maka prodi secara aktif mengikuti forum atau asosiasi Prodi Ilmu Hukum baik di lingkup PTKI maupun Kemenristekdikti.

Potensi Dosen

Kecukupan dosen didasarkan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Berkaitan dengan dosen tetap prodi, Pasal 29 ayat (4) menyatakan “Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.” Kemudian berkaitan dengan kualifikasi akademik minimal dosen program sarjana dan magister, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 46 menyatakan bahwa dosen memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program magister untuk program diploma dan sarjana, dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2015 Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa kualifikasi akademik minimal dosen program sarjana berijazah magister. Berdasarkan dua ketentuan tersebut, maka jumlah dosen dan kualifikasi dosen prodi di Fakultas Syari’ah dan Hukum telah memenuhi syarat.

Sedangkan untuk kinerja dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum merujuk pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 72 dan Buku Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Beban Kerja Dosen UIN Sunan Kalijaga Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan, tugas utama dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 sks dan paling banyak sepadan dengan 16 sks pada setiap semester sesuai dengan dengan kualifikasi akademiknya. Semua dosen di Fakultas Syari’ah dan Hukum sudah melaksanakan kinerja sesuai aturan tersebut.

Adapun prestasi monumental yang pernah diraih oleh dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum antara lain. Dosen Teladan Mutu Tahun 2016 atas nama Prof. Dr. Makhrus, SH., M. Hum, dan Dosen Teladan Mutu Tahun 2017 Prestasi lainnya, diraih Program Studi Ilmu Hukum untuk Kategori Program Studi Teladan Mutu Tahun 2016, dan Fakultas Syari’ah dan Hukum sebagai teladan mutu tahun 2019.

NO	NAMA	NIP	PANGKAT – GOL/RUANG	JABATAN	NIDN	MATA KULIAH / BIDANG ILMU
1	Prof. Dr. Drs. H.Makhrus, S.H., M.Hum.	19680202 199303 1 003	Pembina Utama - IV/e	Guru Besar	2002026802	Ilmu Hukum
2	Dr. H.Ahmad Bahiej, SH., M.Hum	19750615 200003 1 001	Pembina Tk. I- IV/b	Lektor Kepala	2015067501	Hukum Pidana
3	Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.	19650210 199303 2 001	Pembina - IV/a	Lektor Kepala	2010026501	Hukum Tata Negara
4	Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.	19730825 199903 1 004	Pembina Utama Muda - IV/c	Lektor Kepala	2025087301	Ilmu Hukum
5	Iswantoro, S.H., M.H.	19661010 199202 1 001	Pembina - IV/a	Lektor Kepala	2010106602	Hukum Agraria
6	Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum.	19751010 200501 2 005	Penata Tk. I - III/d	Lektor	2010107502	Hukum Tata Negara
7	Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., MA.	19800626 200912 1 002	Penata Tk. I - III/d	Lektor	2026068001	Ilmu Hukum
8	Faisal Luqman Hakim, S.H.,M.Hum	19790719 200801 1 012	Penata - III/c	Lektor	2019077901	Ilmu Hukum
9	M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.	19780212 201101 1 002	Penata - III/c	Lektor	2012027801	Ilmu Hukum
10	Faiq Tobroni, M.H.	19880402 201801 1 001	Penata Muda Tk. I - III/b	Lektor	2002048803	Hukum dan HAM
11	Syaifullahil Maslul, M.H	19900824 201903 1 011	Penata Muda Tk. I - III/b	Asisten Ahli	724089004	Hukum Tata Negara
12	Annisa Dian Arini, MH	19880126 201903 2 007	Penata Muda Tk. I - III/b	Asisten Ahli	2012018802	Hukum Perdata
13	Wardatul Fitri, M.H.	19900511 201903 2 016	Penata Muda Tk. I - III/b	Asisten Ahli	2011059001	Hukum Perdata
14	Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H	Dosen Tetap Bukan PNS		Tenaga Pengajar	2025109101	Hukum Pidana
15	Khoirul Anam, SHI., M.S.I	Dosen Tetap Bukan PNS		Tenaga Pengajar	2130037801	Fikih dan Ushul Fikih

Potensi Mahasiswa

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga menyediakan layanan kemahasiswaan yang disediakan untuk seluruh mahasiswa, yaitu dengan melakukan penelusuran minat dan bakat, bimbingan karir dan wirausaha, dan kesejahteraan. Adapun bentuk layanan kemahasiswaan yang dilakukan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 20
Layanan Kemahasiswaan

No	Jenis Layanan		
	Penalaran, minat, bakat	Kesejahteraan	Bimbingan Karir dan Kewirausahaan
1	Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH)	Beasiswa: 1. Beasiswa institusional - Beasiswa bidikmisi - Beasiswa santri berprestasi - Beasiswa prestasi akademik - Beasiswa prestasi non akademik, - dll	CENDI (Center for Entrepreneurship and Career Development)
2	Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK)	2. Beasiswa non institusional - Beasiswa Bank Indonesia - Beasiswa Gudang Garam - Beasiswa PT Djarum - Beasiswa Supersemar - dll	Job Fair
3	Komunitas Peradilan Semu (KPS)	Asuransi: Kecelakaan (PT Bumiputera Muda)	
4	Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH)	Poliklinik	

Hasil Penelitian

No.	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun (YYYY)
1	2	3	4	5	6
1	Zaakwaarneming dalam Teori dan Praktek Kontemporer	Faisal Luqman Hakim, S.H.,M.Hum.	Hukum Perdata	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2017
2	Potensi Warehouse Receipt System Produk Jamkrindo Sebagai Alternatif Jaminan Lembaga Perbankan Syariah Di Sulawesi Selatan	Faisal Luqman Hakim, S.H.,M.Hum.	Hukum Perdata dan Hukum Dagang	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2018
3	Perikatan dengan Ancaman Denda oleh Advokat Terhadap Klien	Faisal Luqman Hakim, S.H.,M.Hum.	Hukum Perdata dan Hukum Dagang	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2018
4	Pemanfaatan Teknologi, Penyempurnaan Unsur Rekes, dan Administrasi Perkara dalam Pembaharuan Hukum Acara Perdata	Faisal Luqman Hakim, S.H.,M.Hum.	Hukum Acara Perdata	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2019
5	Polemik Pancasila dan Khilafah dalam NKRI (Tinjauan Pemikiran Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi)	Faiq Thobroni	Pancasila	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2018
6	The Common Access as Pro People Management of Natural Resources (An Analysis of Decision Number 3/PUU-VIII/2010 About Judicial Review of Law 27/2007)	Nurainun Mangunsong,S.H.,M.Hum.	Hukum Tata Negara	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2017
7	Penafsiran Hukum Dekonstruksi untuk Pelanggaran Poligami (Kajian Putusan Nomor 937 K/Pid/2013	Prof. Euis Nurlelawati, M.A, Ph.D.	Hukum Perdata	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2018
8	Strategi Organisasi Bantuan Hukum dalam Penyerapan Anggaran Bantuan Hukum Kementerian Hukum dan HAM di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah	Faisal Luqman Hakim, S.H.,M.Hum.	Hukum Acara Perdata	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2017

9	Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan	Prof. Euis Nurlelawati, M.A, Ph.D.	Hukum Perdata	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2017
10	Reduksi Fungsional Dosen: Analisis Perdirjenpendis No. 2 Tahun 2013 tentang disiplin kehadiran dosen	Nurainun Mangunsong, S.H.,M.Hum	Hukum Administrasi Negara	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2017
11	Urgensi Pembaharuan Partai Politik	Nurainun Mangunsong,S.H.,M.Hum.	Hukum Tata Negara	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2018
12	Sikap dan Argumentasi Hukum Partai Keadilan Sejahtera terhadap Kepala Daerah Non Muslim	Nurainun Mangunsong,S.H.,M.Hum.	Hukum Tata Negara	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2018
13	Pancasila dan Toleransi pada Tradisi Keagamaan Masyarakat Jogja	Faiq Tobroni, M.H	Pancasila	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2018
14	Awliya' dalam Kelompak Symbolisme Islam Politik (Sebuah Pendekatan Semiotik)	Nurainun Mangunsong,S.H.,M.Hum.	Hukum Tata Negara	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2017
15	Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum	Prof Ratno Lukito, M.A.,DCL. dan Nurainun Mangunsong S.H.,M.Hum	Hukum Tata Negara	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2018
16	Hak Non-Muslim dalam Hukum Waris Islam (Perbandingan Hukum Waris Indonesia dan Malaysia)	Prof. makhrus,M.Hum Dr. Riyanta, M.Hum dan Dr. Admad Bahiej, M.Hum	Hukum Kewarisan Islam	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2019
17	Pembinaan Bagi Anak Didik Pemasarakatan Pelaku Kejahatan Seksual Di Lembaga Pemasarakatan Anak (LPA) Kelas II A Kutoarjo Jawa Tengah [bahiej]	Dr. Ahmad bahiej, M.Hum	Hukum Pidana	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2017
18	The Model of Legal Education Management System (Banchmark: Melbourne Law School), 2017, Makhrus, Bahiej, Riyanta, Lindra Darnella	Prof. Makhrus, M.Hum, Dr. Ahmad Bahiej,M.Hum, Dr. Riyanta, M.Hum dan Dr. Lindra Darnella, M.Hum	Politik Hukum	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2017

19	Kompedium Bidang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional	Dr. Ahmad bahiej, M.Hum	Hukum Pidana	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2018
20	Chemical Castration for Sexual Offenders in Indonesia (A Study from Chemical Castration in South Korea and United States of America)	Prof. Makhrus, M.Hum, Dr. Riyanta, M.Hum dan Dr. Ahmad Bahiej, M.Hum	Hukum Pidana	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2018
21	Mapping the Relationship of Competing Legal Traditions in the Era of Transnationalism in Indonesia	Prof Ratno Lukito, M.A., DCL.	Perbandingan Hukum	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2017
	PkM				
22	Pendampingan Perkara Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2017 sampai Tahun 2019	Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum	Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2017-2019
23	Pendampingan Perkara Permohonan Ahli Waris di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Magelang Tahun 2018 sampai Tahun 2019	Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum	Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2017-2019
24	Pendampingan Perkara Gugatan Waris di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018	Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum	Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2018
25	Sebagai Mediator dalam perkara Perdata berdasarkan penunjukkan Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tahun 2018 di Pengadilan Agama Sleman	Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum	Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2017
26	Model Toleransi Keagamaan Masyarakat Sinkretis Girikarto Panggang Gunungkidul Yogyakarta	Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum	Hukum Tata Negara	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2017
27	Model dan Metode Toleransi Keagamaan dalam Masyarakat	Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum	Hukum Tata Negara	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2018

	Puritanis di Kota Baru Yogyakarta 2018				
28	Optimalisasi Dana Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Gedangsari Gunungkidul Yogyakarta 2019	Nurainun Mangungsong, S.H.,M.Hum	Hukum Tata Negara	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2019
29	Hubungan Muslim dan Non Muslim Dalam Kewarisan	Dr. Riyanta, M.Hum	Hukum Perdata Islam	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2018
30	Ijtihad Dan Isu-Isu Hukum Kewarisan	Dr. Riyanta, M.Hum	Hukum Perdata Islam	Referensi Mata Kuliah (Termuat dalam RPS)	2018

Sementara itu, Penelitian lainnya adalah sebagai berikut:

1	Judul	: Penanganan Covid-19 Dan Pengembangan Hukum Ham Konteks Indonesia	31-11-2020
	Penulis	: Pertama (tunggal)	
	Nama Jurnal	: ISTINBATH: Jurnal Hukum	
	Nomor ISSN	: 1829-8117 (p-ISSN) dan 2527-3973 (e-ISSN)	
	Volume/nomor	: Vol. 17, No. 2,	
	Edisi (Bulan/Tahun)	: November 2020,	
	Status Akreditasi	Sinta 3	
	No. Akreditasi	: Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14/E/KPT/2019	
	Penerbit	: Fakultas Syariah IAIN Metro	
	Hlm, jml hlm.	: 176-201 (26 halaman)	
	alamat web	: https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/2294	
2	Judul	: The Similarity of The Medina Charter and The Indonesian Constitution In Human Right's Protection	
	Penulis	: Pertama (tunggal)	
	Nama Jurnal	: AL-BAYYINAH: Journal of Islamic Law	
	Nomor ISSN	: 1979-7486 (p-ISSN) dan 2580-5088 (e-ISSN)	
	Volume/nomor	: Vol. 4, No. 2,	
	Edisi (Bulan/Tahun)	: Desember 2020,	
	Status Akreditasi	Sinta 5	
	No. Akreditasi	:	

		Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28/E/KPT/2019
	Penerbit	: Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone
	Hlm, jml hlm.	: 212-224 (13 halaman)
	alamat web	: https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/836
3	Judul	: TINJAUAN HAM DALAM REGULASI PPPK DENGAN INTERTEKSTUALITAS TEKS HUKUM (Human Rights Review in Regulations on PPPK with Intertextuality Legal Text)
	Penulis	: Pertama (tunggal)
	Nama Jurnal	: Jurnal HAM
	Nomor ISSN	: 1693-8704 (p-ISSN) dan 2579-8553 (e-ISSN)
	Volume/nomor	: Vol. 11, No. 2,
	Edisi (Bulan/Tahun)	: Agustus 2020,
	Status Akreditasi	Sinta 2
	No. Akreditasi	: Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36/E/KPT/2019
	Penerbit	: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia
	Hlm, jml hlm.	: 219-238 (20 halaman)
	alamat web	: https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1172
4	Judul	: PELARANGAN AKTIVITAS KELOMPOK KEAGAMAAN TANPA KOMENTAR UMUM KIHSP (Kajian Putusan Nomor 23 P/HUM/2011)
	Penulis	: Pertama (tunggal)
	Nama Jurnal	: Jurnal Yudisial
	Nomor ISSN	: 1978-6506 (p-ISSN) dan 2579-4868 (e-ISSN)
	Volume/nomor	: Vol. 13, No. 2,
	Edisi (Bulan/Tahun)	: Agustus 2020,
	Status Akreditasi	Setara Sinta 2
	No. Akreditasi	: Keputusan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 706/AU/P2MI-LIPI/10/2015
	Penerbit	: Komisi Yudisial Republik Indonesia
	Hlm, jml hlm.	: 125-144 (20 halaman)
	alamat web	: https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/438
5	Judul	: PEMBATASAN KEGIATAN KEAGAMAAN DALAM PENANGANAN COVID-19

	Penulis	: Pertama (tunggal)
	Nama Jurnal	: Jurnal Komunikasi Hukum
	Nomor ISSN	: 2356-4164 (p-ISSN) dan 2407-4276 (e-ISSN)
	Volume/nomor	: Vol. 6, No. 2,
	Edisi (Bulan/Tahun)	: Agustus 2020,
	Status Akreditasi	Setara Sinta 4
	No. Akreditasi	:
	Penerbit	: Prodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha
	Hlm, jml hlm.	: 369-395 (27 halaman)
	alamat web	: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/28062
6	Judul	: NUSYUZ DALAM TINJAUAN PRINSIP HAM
	Penulis	: Pertama (tunggal)
	Nama Jurnal	: Jurnal Al-Maslahah
	Nomor ISSN	: 1907-0233 (p-ISSN) dan 2502-8367 (e-ISSN)
	Volume/nomor	: Vol. 16, No. 1,
	Edisi (Bulan/Tahun)	: Juni 2020,
	Status Akreditasi	Sinta 4
	No. Akreditasi	: Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21/E/KPT/2018
	Penerbit	: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Pontianak
	Hlm, jml hlm.	: 14-33 (20 halaman)
	alamat web	: http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/view/1783
7	Judul	: Paradigma HAM dalam Pembatasan Organisasi Masyarakat Keagamaan Kontra Pancasila
	Penulis	: Pertama Koresponden (kelompok)
	Nama Jurnal	: ISTINBATH: Jurnal Hukum
	Nomor ISSN	: 1829-8117 (p-ISSN) dan 2527-3973 (e-ISSN)
	Volume/nomor	: Vol. 16, No. 2,
	Edisi (Bulan/Tahun)	: November 2019,
	Status Akreditasi	Sinta 3

	No. Akreditasi	: Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14/E/KPT/2019
	Penerbit	: Fakultas Syariah IAIN Metro
	Hlm, jml hlm.	: 130-149 (20 halaman)
	alamat web	: https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/1701
8	Judul	: SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN NARKOBA SEBAGAI SYARAT PERMOHONAN KEHENDAK NIKAH (Inovasi Penataan Administrasi Perkawinan di KUA Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara)
	Penulis	: Kedua Koresponden (kelompok)
	Nama Jurnal	: Jurnal Al-Ahwal
	Nomor ISSN	: 2085-627X (p-ISSN) dan 2528-6617 (e-ISSN)
	Volume/nomor	: Vol. 12, No. 2,
	Edisi (Bulan/Tahun)	: Desember 2019,
	Status Akreditasi	Sinta 2
	No. Akreditasi	: Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21/E/KPT/2018
	Penerbit	: Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
	Hlm, jml hlm.	: 117-129 (13 halaman)
	alamat web	: http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1816
9	Judul	: Pembedaan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama (Studi Putusan No. 69/PID.B/2012/PN.SPG)
	Penulis	: Pertama (tunggal)
	Nama Jurnal	: Jurnal Al-Jinayah
	Nomor ISSN	: 2460-5565 (p-ISSN) dan 2503-1058 (e-ISSN)
	Volume/nomor	: Vol. 5, No. 2,
	Edisi (Bulan/Tahun)	: Desember 2019,
	Status Akreditasi	Sinta 4
	No. Akreditasi	: Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21/E/KPT/2018
	Penerbit	: Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya
	Hlm, jml hlm.	: 489-510 (22 halaman)

	alamat web	:	http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/999
10	Judul	:	AGAMA DAN HAK MILIK SEBAGAI SPIRIT PERLAWANAN RAKYAT SEMESTA DALAM PERANG DIPONEGORO
	Penulis	:	Pertama Koresponden (kelompok)
	Nama Jurnal	:	Jurnal Dinamika Penelitian
	Nomor ISSN	:	1412-2669 (p-ISSN) dan 2549-4244 (e-ISSN)
	Volume/nomor	:	Vol. 19, No. 2,
	Edisi (Bulan/Tahun)	:	Desember 2019,
	Status Akreditasi		
	No. Akreditasi	:	
	Penerbit	:	LPPM IAIN Tulungagung
	Hlm, jml hlm.	:	326-348 (23 halaman)
	alamat web	:	http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/dinamika/article/view/2124

BAB IV PAYUNG PENELITIAN

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Nama Payung Penelitian

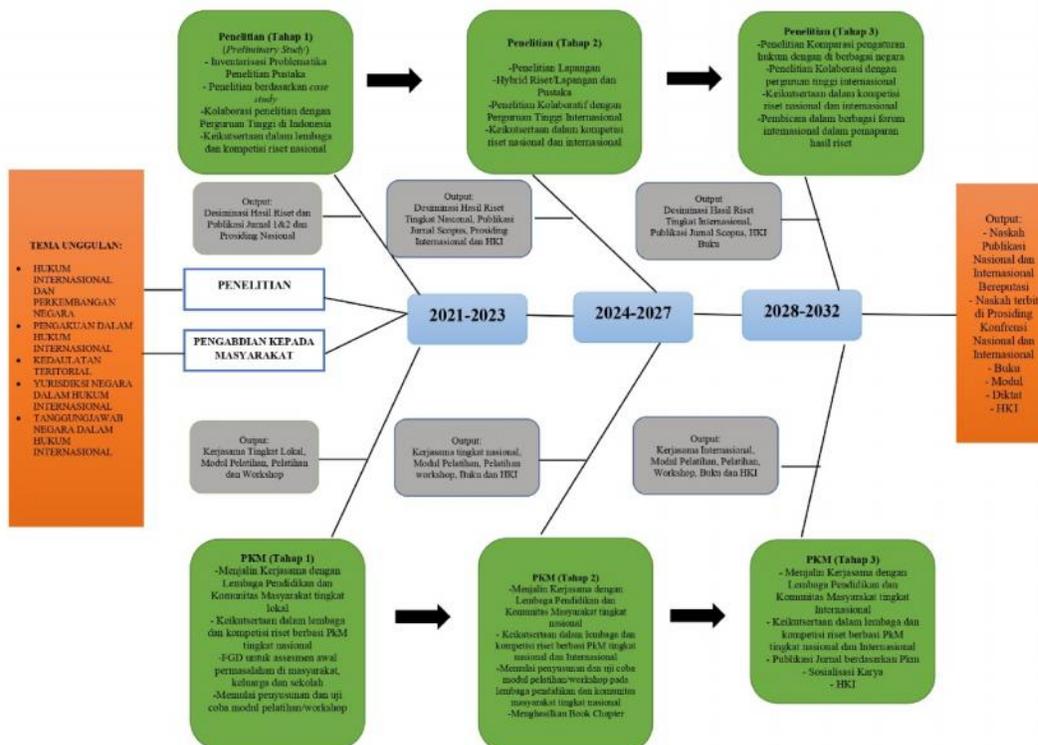
RUMPUN KEILMUAN HUKUM INTERNASIONAL

Berdasarkan pemilahan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Program Studi Ilmu Hukum dipetakanlah klasifikasi dosen dengan konsentrasi Hukum Internasional ke dalam klasifikasi Hukum Internasional dan Hukum Perdata Internasional. Adapun klasifikasi terhadap dosen adalah sebagai berikut:

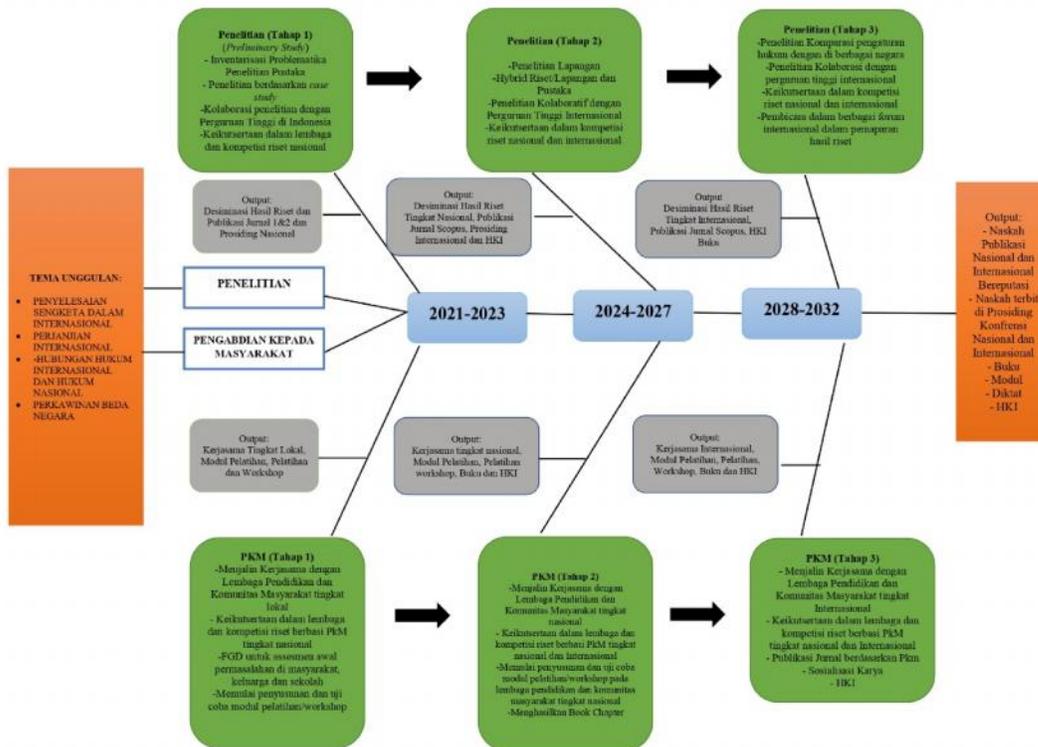
NO	HUKUM INTERNASIONAL	HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
1	Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.	Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

RENCANA KERJA DAN TAHAPAN

GAMBAR I: HUKUM INTERNASIONAL



GAMBAR II: HUKUM PERDATA INTERNASIONAL



RUMPUN KEILMUKAN HUKUM TATA NEGARA

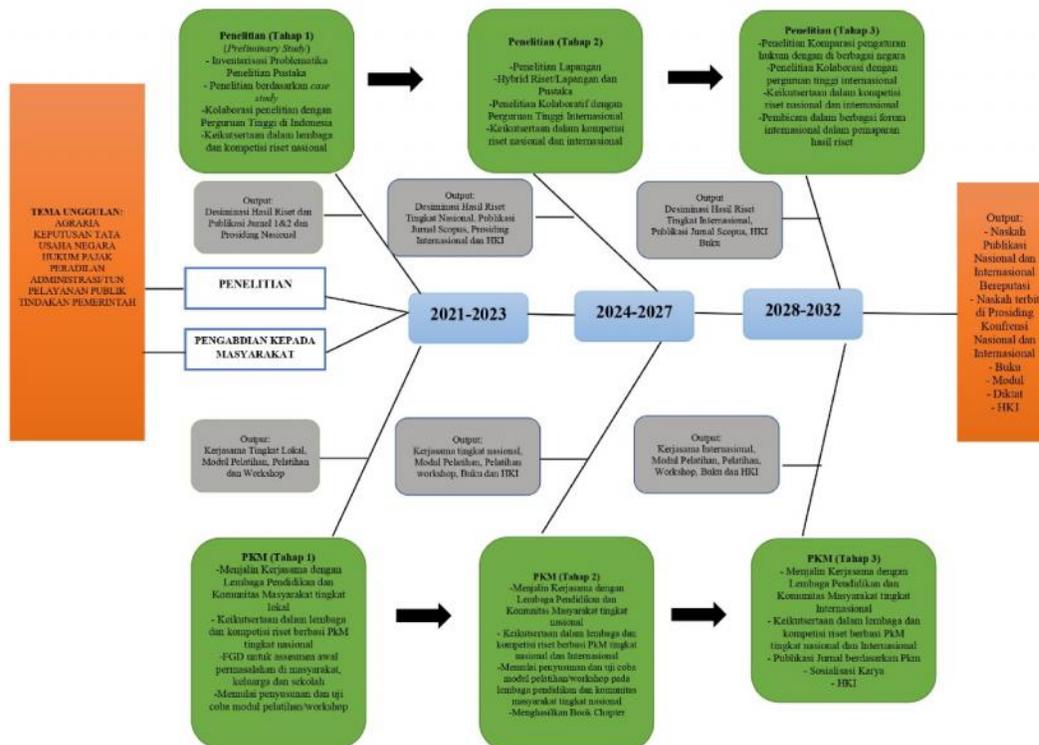
Berdasarkan pemilahan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Program Studi Ilmu Hukum dipetakanlah klasifikasi dosen dengan konsentrasi Hukum Tata Negara ke dalam berbagai klasifikasi seperti HAN, Konstitusi, Sistem Pemilihan dan HAM. Adapun klasifikasi terhadap dosen adalah sebagai berikut:

HAN	KONSTITUSI	SISTEM PEMILIHAN	HAM
Iswantoro, S.H.,M.H.	Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.	Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.	Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

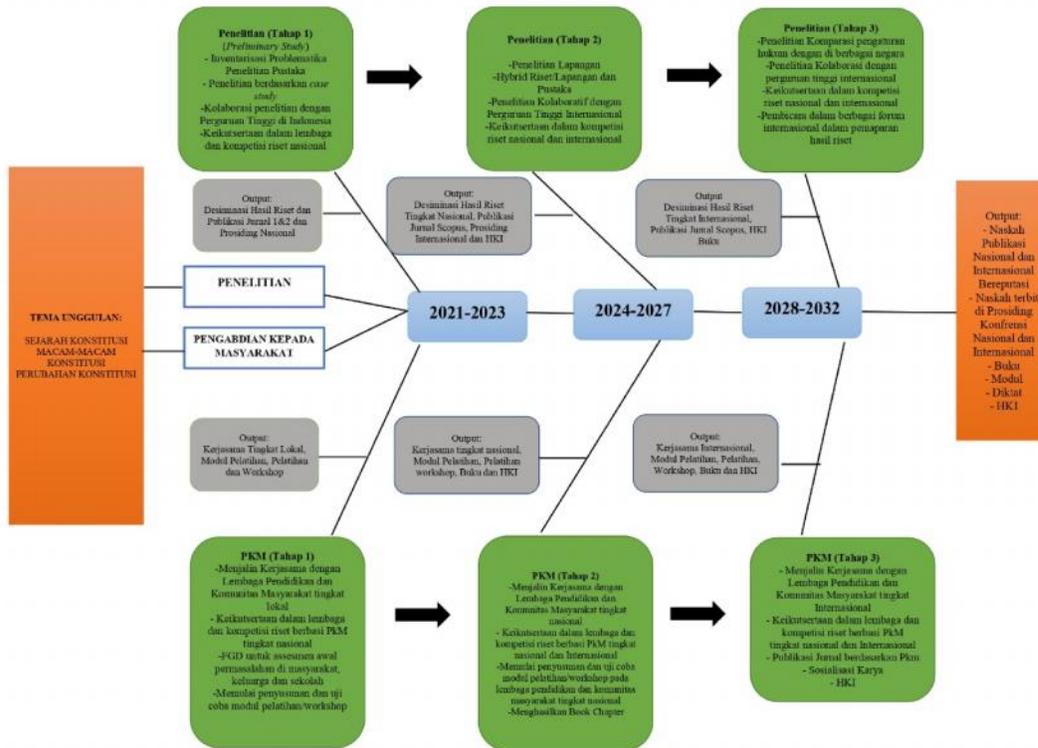
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.	Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.	Syaifullahil Maslul, M.H.	Faiq Tobroni, M.H.
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.	Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.	Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.	Syaifullahil Maslul, M.H.
Syaifullahil Maslul, M.H.			

RENCANA KERJA DAN TAHAPAN

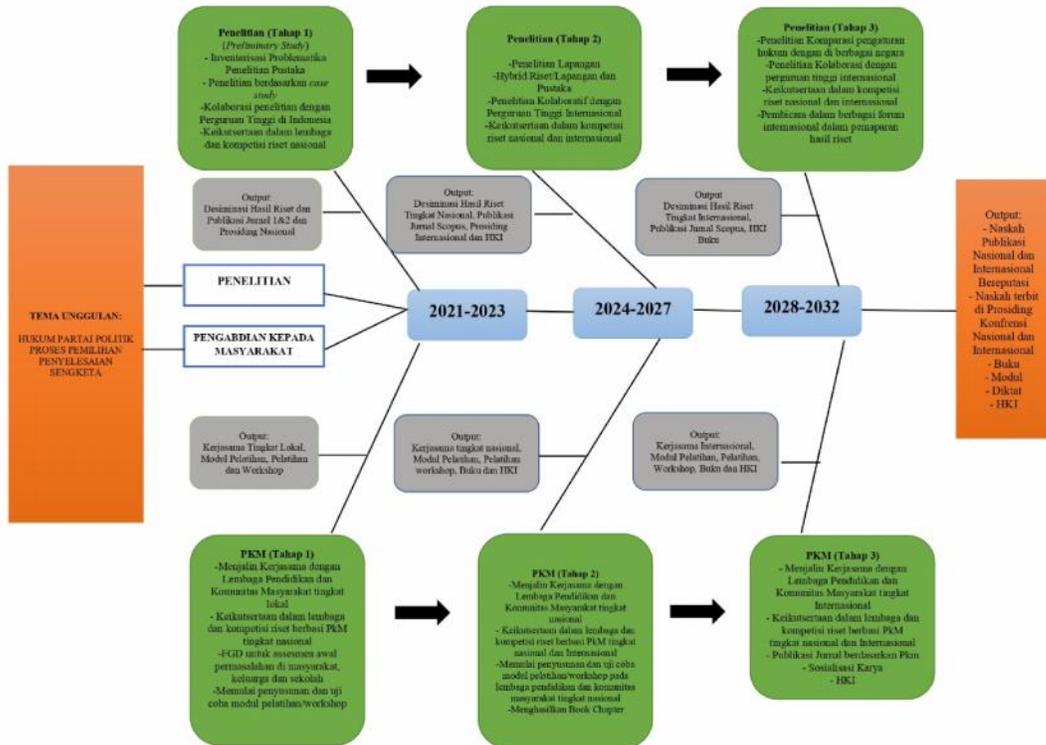
GAMBAR I: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



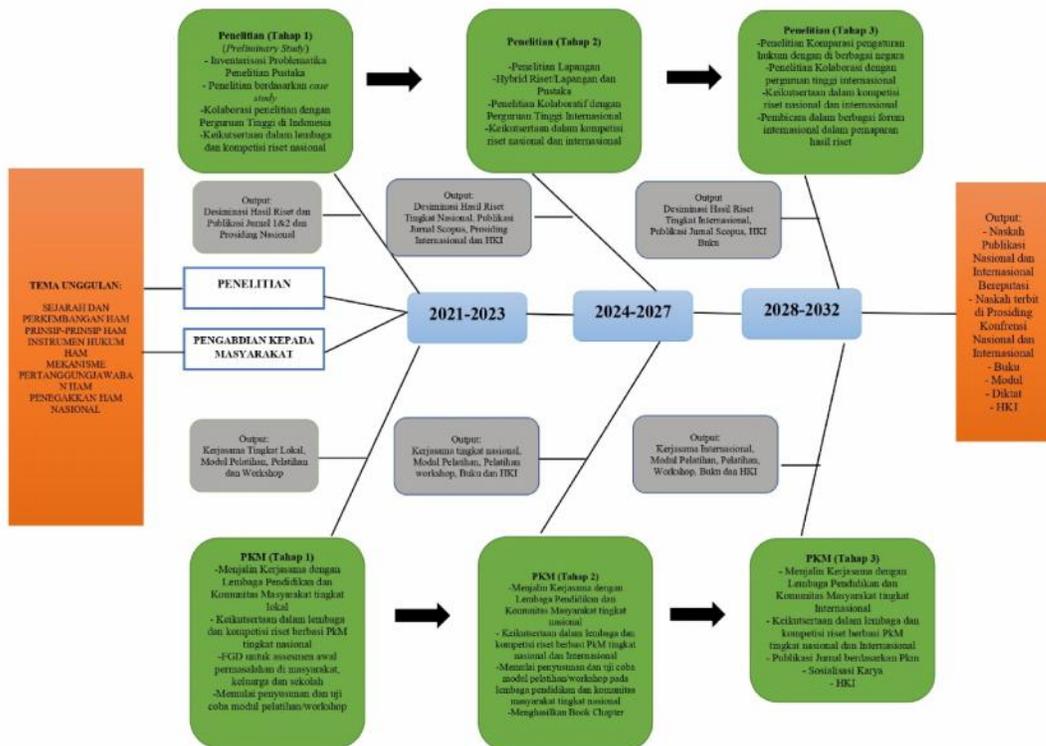
GAMBAR II: KONSTITUSI



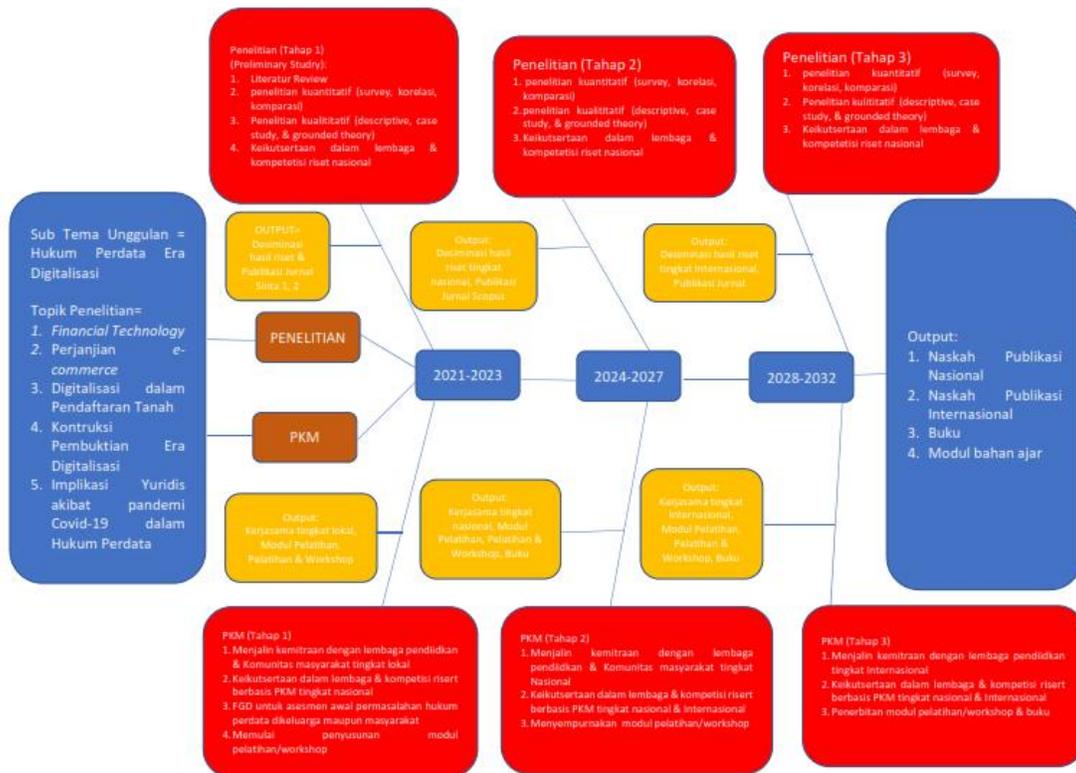
GAMBAR III: SISTEM PEMILIHAN



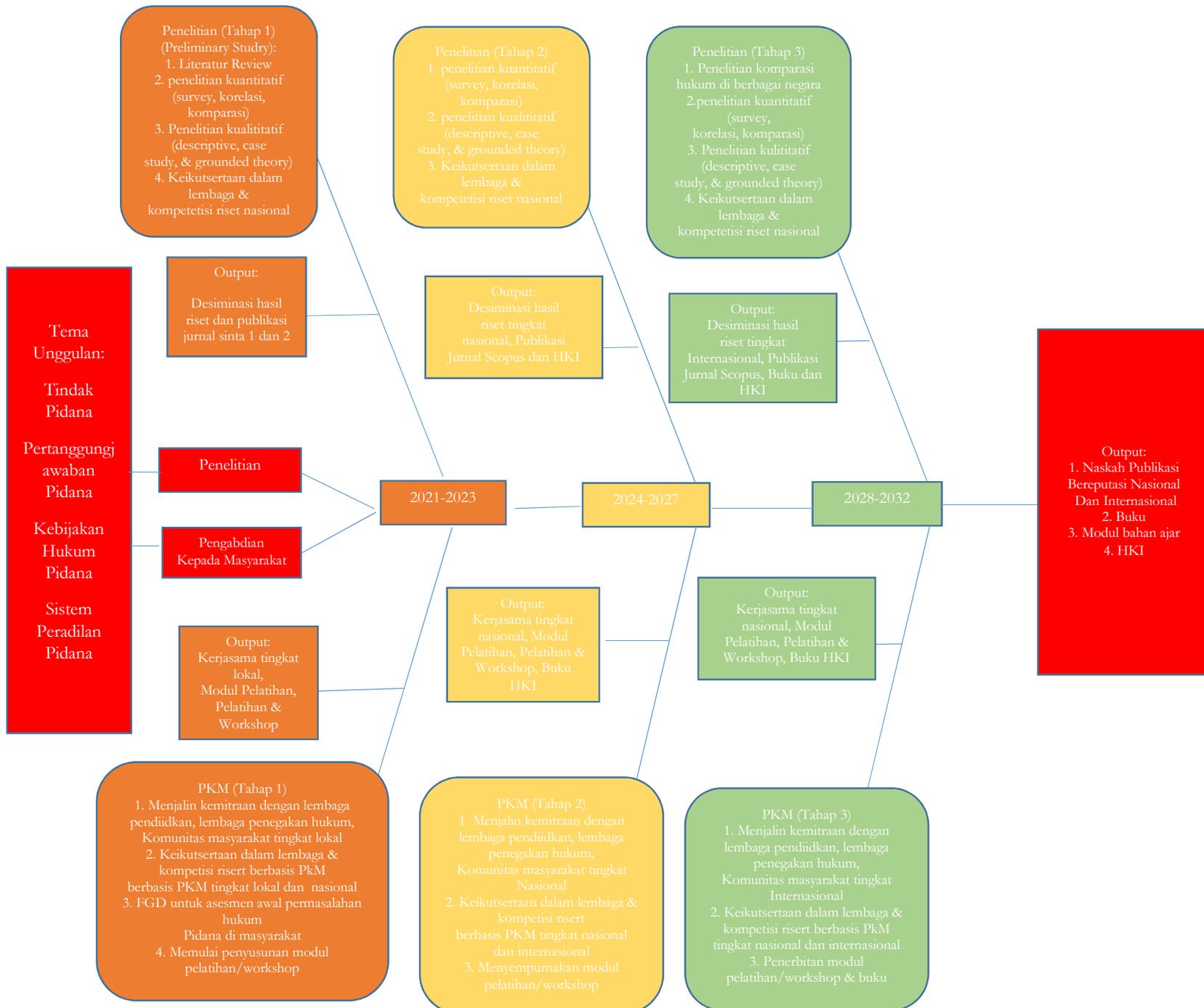
GAMBAR IV: HAK ASASI MANUSIA



RUMPUN HUKUM PERDATA



RUMPUN HUKUM PIDANA



BAB V PENUTUP

Peta jalan Penelitian Prodi Ilmu Hukum ini sebagai arah kegiatan Penelitian yang penting dimiliki dan diimplementasikan oleh seluruh civitas akademika Prodi Ilmu Hukum agar menghasilkan *outcomes* Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan keilmuan Ilmu Hukum yang harapannya akan berdampak besar pada masyarakat luas. Peta jalan Penelitian ini perlu segera ditindaklanjuti melalui berbagai program yang telah direncanakan. Lulusan Prodi Ilmu Hukum yang semakin berkualitas, peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa, serta produk Penelitian yang memiliki nilai guna menjadi target akhir peta jalan Penelitian yang telah disusun, sebagai kontribusi Prodi Ilmu Hukum dalam turut membangun dan mengembangkan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam berbagai sektor.

REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- k. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
- l. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
- m. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
- n. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
- o. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
- p. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
- q. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
- r. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
- s. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
- t. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
- u. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
- v. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
- w. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
- x. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019

- y. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
- z. Abdullah, M.A. 2006. *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Revisi 1. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- aa. Ristekdikti. Peta Jalan Penelitian. DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan. Diakses pada tanggal 25 Januari 2021 dari <https://docplayer.info/52078961-Peta-jalan-penelitian-drpm-ditjen-penguatan-ri-set-dan-pengembangan.html>
- bb. Peraturan BAN-PT no 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusun Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- cc. Peraturan BAN-PT no 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusun Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
- dd. Peraturan BAN-PT No 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Peraturan BAN-PT No 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi